

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Umum .....	3
2. Dasar .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Tema .....	5
5. Sasaran .....	5

**BAB II PELAKSANAAN**

6. Waktu dan Tempat .....	8
7. Kepanitiaan .....	10
8. Peserta .....	12
9. Agenda Pelaksanaan .....	12
10. Materi Pelaksanaan	
a. Arahan Kapolri pada pembukaan Rakernis gabungan Satker Puskeu Polri, PusedokkesPolri, Puslitbang Polri dan Pusjarah Polri yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bertempat di Rupattama Mabes Polri .....	15
b. Arahan Kapuskeu Polri.....	17
c. Paparan Sespuskeu Polri.....	19
d. Paparan Kabidkeu II .....	21
e. Paparan Kelompok I .....	23
f. Paparan Kelompok II.....	23
g. Paparan Kelompok III.....	23
h. Paparan Kelompok IV.....	23
i. Paparan Kabid Pembiayaan.....	23
j. Paparan Kelompok V .....	25
k. Paparan Kelompok VI.....	25
l. Paparan Kelompok VII .....	26
m. Paparan Sosialisasi Aplikasi Puskeu Presisi .....	26

n. Paparan Kabidkeu II .....	27
o. Paparan Kabid Akuntansi Pelaporan Keuangan .....	28

<b>BAB III HASIL YANG DICAPAI .....</b>	<b>31</b>
---	-----------

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN :**

Surat Permohonan Ijin Pelaksanaan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021

Sprin Panitia Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021`

Telegram Pemberitahuan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021

Absensi Panitia Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021

Absensi Peserta Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021

Absensi Nara sumber Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan prioritas utama serta harus menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap personel yang bertugas di jajaran keuangan mengingat tugas dibidang keuangan merupakan amanah yang cukup berat dan memerlukan integritas yang baik untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Polri secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya *Good & Clean Governance* yang merupakan syarat mutlak pencapaian tujuan nasional yang salah satu sarannya adalah meningkatkan Profesionalisme Aparatur Negara termasuk Polri, untuk wujudkan Polri yang unggul dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapim Polri Tahun 2021 dan koordinasi antara pelaksana pengemban fungsi keuangan di lingkungan Polri dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2020 untuk ke delapan kalinya, Puskeu Polri menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pusat Keuangan Polri T.A. 2021 yang telah diprogramkan dalam Renja dan Penetapan Kinerja Puskeu Polri T.A. 2021 para pengemban fungsi keuangan di

lingkungan Polri dengan harapan dapat memberikan informasi terkini dalam pengelolaan keuangan negara dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan di bidang pengelolaan keuangan negara pada tingkat Satker/Kewilayahan.

- d. Dengan telah terlaksananya kegiatan Rakernis Keuangan T.A. 2021, maka perlu disusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## **2. Dasar**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahan Nomor 50 Tahun 2018;
- b. Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahan Nomor 178/PMK.05/2018;
- c. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/90/II/KEP./2021g tanggal 10 Februari 2021 tentang Panitia penyelenggara Rakernis Fungsi Keuangan T.A. 2021;
- d. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/369/II/KEP./2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Jukrah pelaksanaan Rakernis T.A. 2021;
- e. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/622/III/REN.2.3./2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan T.A. 2021;
- f. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/155/III/KEP./2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pendukung Panitia penyelenggara Rakernis Fungsi Keuangan T.A. 2021;
- g. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/658/III/REN.2.3./2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberian Apresiasi atas pencapaian IKPA terbaik T.A. 2020;
- h. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/490/III/KEP./2021/Puskeu tanggal 26 Maret 2021 perihal permohonan Tenaga Media dan Rapid test Antigen;

- i. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/491/III/KEP./2021/Puskeu tanggal 26 Maret 2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan rakernis fungsi Keuangan Polri T.A. 2021;
- j. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/497/III/KEP/2021/Puskeu tanggal 29 Maret 2021 perihal permintaan bantuan personel dan perlengkapan *Zoom Meeting* untuk kegiatan Rakernis Fungsi keuangan T.A. 2021
- k. Surat Perintah Kapuskeu polri Nomor: Sprin/156/III/KEP./2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Nara Sumber pada kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan T.A. 2021;
- l. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/191/IV/KEP./2021 tanggal 9 April 2021 Perihal diperbantukan sebagai Driver Sekretaris Pusat Keuangan Polri;
- m. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/504/III/KEP./2021/Puskeu tanggal 31 Maret 2021 perihal undangan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021;
- n. Surat Kapolri Nomor: B/220/III/REN.2.3./2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Undangan penerimaan penghargaan IKPA;
- o. DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2020 Nomor: SP DIPA/060.01.1.642381/2019 tanggal 12 November 2019.

**3. Maksud dan Tujuan**

a. Maksud.

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Keuangan Polri T.A. 2021 dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi sekaligus arahan kepada peserta Rakernis mengenai hal-hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan berkaitan dengan fungsi keuangan.

b. Tujuan.

Agar para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang kebijakan Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang keuangan.

**4. Tema**

**“JAJARAN KEUANGAN POLRI SIAP Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk mewujudkan Polri Presisi”**

**5. Sasaran**

- a. Adanya tekad dan semangat para penyelenggara Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021 untuk berubah ke arah yang semakin baik dengan dilandasi semangat paradigma baru;
- b. Tercapainya peningkatan kinerja para pengemban fungsi keuangan tentang arah dan kebijakan pimpinan Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman serta pemberian solusi para peserta Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021 tentang:
  - 1) Kebijakan Pimpinan hasil Rapim Polri terkait Fungsi Keuangan T.A. 2021;
  - 2) Realisasi tunjangan kinerja, kontijensi, jaldis mutasi dan anggaran tertentu di lingkungan Polri tahun 2021;
  - 3) Anev Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan T.A. 2021 dan Permasalahannya;
  - 4) Anev hasil indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) T.A. 2020 dan Permasalahannya;
  - 5) Aplikasi Puskeu Presisi;
  - 6) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - 7) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Bendahara Pengeluaran (BPG)/Bensatker;
  - 8) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
  - 9) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Bendahara Penerimaan (Benma);
  - 10) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Pengelolaan Keuangan Tingkat Satker/Subsatker;
  - 11) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Penerimaan Hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa;
  - 12) *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Penerimaan dan Penggunaan dana Samsat pada Polda.

- d. Organisasi. Guna menunjang terselenggaranya rakernis, telah disusun panitia penyelenggara sesuai Surat perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/90/II/KEP./2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Susunan kepanitian Penyelenggaraan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021.
- e. Akomodasi. Selama pelaksanaan Rakernis, peserta dan panitia disiapkan akomodasi/penginapan.
- f. Konsumsi. Makan, snack dan minuman bagi peserta Rakernis disajikan di tempat-tempat yang telah disediakan, pada jam-jam istirahat/Ishoma.
- g. Keamanan. Disamping petugas keamanan yang disiapkan panitia, agar para peserta ikut menjaga dan mengamankan barang masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- h. Pelayanan.
  - 1) Pelayanan untuk kepentingan dan kelancaran acara Rakernis dapat disampaikan melalui sekretariat penyelenggara.
  - 2) Bagi peserta yang beragama islam dapat melaksanakan Sholat di tempat yang telah disediakan.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**

**II PELAKSANAAN**

**6. Waktu dan Tempat**

1) Hari Kesatu

Pelaksanaan:

Hari : Minggu

Tanggal : 4 April 2021

Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;

Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

Adapun urutan acara sebagai berikut:

1. Cek in panitia dan peserta Rakernis fungsi keuangan.

2) Hari Kedua

Pelaksanaan:

a. Hari : Senin

Tanggal : 5 April 2021

Pukul : 07.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;

Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

Adapun urutan acara sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia (Kabidkeu II Mabes);
2. Acara pembukaan rakernis fungsi keuangan tahun 2021 oleh Sespuskeu Polri;
3. Arahkan, Paparan, dan diskusi oleh Sespuskeu Polri;
4. Paparan dan diskusi oleh Kabidkeu II Mabes.
5. Diskusi dan penyusunan *Standar operasional prosedur* (SOP);
6. Paparan SOP oleh masing-masing penanggungjawab kelompok.

- b. Hari : Senin  
Tanggal : 5 April 2021  
Pukul : 15.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Gedung Rupattama Mabes Polri

Adapun urutan acara sebagai berikut:

1. Acara pembukaan Rakernis gabungan Puslitbang Polri, Puskeu Polri, Pusedokkes Polri, Pusjarah Polri oleh Kapolri;
2. Arahan Kapolri;
3. Foto Bersama;
4. Arahan Kapolri;
5. Pemberian penghargaan;
6. Peluncuran aplikasi Dokkes Presisi dan Puskeu Presisi.

2) Hari Ketiga

- Hari : Selasa;  
Tanggal : 6 April 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai;  
Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;  
Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

Adapun urutan acara sebagai berikut:

1. Paparan oleh Kabid Bia;
2. Paparan SOP oleh masing-masing penanggungjawab kelompok;
3. Sosialisasi Aplikasi Puskeu Presisi oleh Kombes Pol Eryek. K;
4. Paparan oleh Kabidkeu II Mabes ;
5. Paparan oleh Kabid APK.

3) Hari Ketiga

- Hari : Rabu;  
Tanggal : 7 April 2021  
Pukul : 06.00 WIB s.d. Selesai;  
Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;

Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

Adapun urutan acara sebagai berikut:

1. Olah raga bersama;
2. Arahan, Paparan, Pembulatan dan Penutupan oleh Kapuskeu Polri.

## **7. Kepanitiaan**

Berdasarkan Surat perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/90/II/KEP./2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Susunan kepanitiaan Penyelenggaraan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Kapuskeu Polri  
Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H.
- b. Penanggung Jawab : Sespuskeu Polri  
Kombes Pol. Ane Kristina, S.A.P.
- c. Ketua Panitia : Kabidkeu II Mabes  
Kombes Pol. Enjih Sanjaya, S.E.
- d. Wakil Ketua : Kabid Verif  
Kombes Pol. Maya Purnama Ningrum, S.E.
- e. Pengawas Kelompok III : Kabid Bia  
Kombes Pol. Ronny Azwawie, S.H., S.I.K.
- f. Pengawas Kelompok VI : Kabid Apk  
Kombes Pol. Zulfikar a, S.E., S.Ked. M.Si.
- g. Pengawas Kelompok V : Kabid Dal  
Kombes Pol. Ikhlas Putro Warsono, S.I.K.
- h. Pengawas Kelompok VI : Kabidkeu I Mabes  
Kombes Pol. Supto Prabowo, S.H., M.Si.
- i. Pengawas Kelompok VII : Anjak Puskeu Polri  
Kombes Pol. Eryek Kusmayadi, S.Sos, S.I.K.
- j. Sekretaris : Kasubbag Binfung Set  
AKBP Zatil Usna, S.I.K

- k. Anggota : Pamin Gaji Urkeu  
Penda Komaryatun, S.E.
- l. Bendahara : Bendahara  
Iptu Ida Hari Turtiati, S.H
- m. Anggota : Bamin Urkeu  
Briptu Arif Prasetyo
- n. Sie Materi : Plt. Kasubbag Sumda Set  
AKBP S. Ferdinand Suwarji, S.E.
- o. Anggota : Paur Dal Subbid Dal Bidkeu I Mabes  
Penata TK. I Purwo Yudo Wibowo, S.E.
- p. Anggota : Ps. Paur Dal Subbid Dal Bidkeu II Mabes  
Penata Ahmad Damanhuri, S.E.
- q. Sie Acara dan LO : Kasubbag Ren Set  
AKBP Diana Safety HW, S.E., M.M
- r. Anggota : Pamin Subbag Renmin  
Penata Fitri Kusumadewi, S.E.
- s. Anggota : Bamin Subbag Ren Set  
Briptu Megawati Hermana
- t. Operator : Banum Bid Verif  
Pengatur Putranto Jum Prasetyo, A.Md
- u. Operator : Banum Bid Verif  
Pengatur Pahottan Siahan, A.Md
- v. MC : Bamin Urkeu  
Briptu Nida Nur Hasanah
- w. Do'a : Banum Bid Bia  
Pengatur Amar Nasrullah, A.md. Kom
- x. Notulen I : Paur Prodiklat Subbag Binfung Set  
Penata Tk. I Patria Priambudi, S.E
- y. Notulen II : Pamin Subbag Sumda Set  
Penata Wahyu Dwi Cahyarini, S.E
- z. Notulen III : Pamin Urkeu  
Penda Eli Chotimah, A.Md

- aa. Sie Konsumsi : Paur Pers Subbag Sumda Set  
Pembina Andari Wulan, S.E
- bb. Anggota : Banum Subbag Sumda Set  
Pengatur I Sunarti
- cc. Sie Akomodasi dan : Kasubbid Non APBN Bid Bia  
Perlengkapan AKBP Seffy O Brahma, S.E.
- dd. Anggota : Banum Urtu  
Penda Sigit Fitriato, A.Md
- ee. Anggota : Bamin Bid Dal  
Pengatur Yusuf Hambali, A.Md
- ff. Sie Dokumentasi : Bamin Subbag Binfung Set  
Briptu Jajang Rahmat, S,Pd
- gg. Anggota : Banum Bid Dal  
Pengda I Yuniawan Iskhar

**8. Peserta**

Adapun Peserta Rapat Kerja Teknis Keuangan T.A. 2021 sebanyak 135 orang yang terdiri dari:

Kabidkeu Polda .....	34 orang
Perwakilan Kasubbid Polda .....	36 orang
Perwakilan BenSatker Polda dan Satker Mabes Polri .....	20 orang
Personil Puskeu Polri .....	7 orang
Panitia penyelenggara .....	35 orang
Tim Kesehatan .....	3 orang

**9. Agenda Pelaksanaan**

- a. Hari/Tanggal : Minggu, 4 April 2021
- Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;  
Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.
- Acara** :  
14.00 – 18.00 WIB Cekin Peserta dan Panitia Rakernis

- b. Hari : Senin  
Tanggal : 5 April 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;  
Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

**Acara :**

- 08.00 - 09.30 WIB Pembukaan, Arahan, dan paparan Sespuskeu Polri;
- 09.30 - 10.00 WIB Coffe break dan persiapan ke ruang meeting kecil;
- 10.00 - 10.45 WIB Diskusi dan penyusunan SOP sesuai dengan kelompok dan kelas yang telah ditentukan;
- 10.45 - 11.30 WIB Diskusi dan penyusunan SOP sesuai dengan kelompok dan kelas yang telah ditentukan;
- 11.30 - 12.30 WIB Ishoma;
- 12.30 - 13.15 WIB Diskusi dan penyusunan SOP sesuai dengan kelompok dan kelas yang telah ditentukan;
- 13.15 - 14.00 WIB Paparan Kabidkeu II Mabes tentang mekanisme pencairan PNBPN di lingkungan Polri;
- 14.00 - 15.00 WIB Persiapan pembukaan Rakernis gabungan Puslitbang, Puskeu, Pusedokkes dan Pusjarah Polri;
- 15.00 - 15.30 WIB Pembukaan Rakernis Gabungan Puslitbang, Puskeu, Pusedokkes dan Pusjarah Polri dengan menggunakan aplikasi zoom meeting;
- 15.30 - 15.45 WIB Coffe Break dan Sholat Ashar;
- 15.45 - 16.30 WIB Diskusi dan penyusunan SOP sesuai dengan kelompok dan kelas yang telah ditentukan;
- 16.30 - 17.15 WIB Diskusi dan penyusunan SOP sesuai dengan kelompok dan kelas yang telah ditentukan;

17.15 - 17.45 WIB	Paparan Kelompok I atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
17.45 - 19.30 WIB	Ishoma;
19.30-20.00 WIB	Paparan Kelompok II atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
20.00-20.30 WIB	Paparan Kelompok III atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
20.30-21.00 WIB	Paparan Kelompok IV atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;

- c. Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;  
Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

**Acara :**

08.00 - 09.30 WIB	Paparan Kabid Pembiayaan tentang Anev Realisasi tunjangan kinerja, dana kontijensi, jaldis mutasi dan anggaran tertentu tahun 2020 dan permasalahannya;
09.30 - 10.00 WIB	Coffe Break
10.00 - 10.30 WIB	Paparan Kelompok V atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
10.30 - 11.00 WIB	Paparan Kelompok VI atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
11.00 - 11.30 WIB	Paparan Kelompok VII atas hasil diskusi terkait SOP yang dibuat;
11.30 - 12.30 WIB	Ishoma;
12.30 - 14.00 WIB	Sosialisasi Aplikasi Puskeu Presisi oleh Kombes Pol. Eryek Kusmayadi, S.Sos, S.I.K;

14.00 - 15.30 WIB	Paparan Kabidkeu II Mabes Polri tentang Anev atas pengelolaan PNBK di lingkungan Polri T.A. 2020 dan permasalahannya;
15.30 - 16.00 WIB	Coffe Break dan Sholat Ashar;
16.00 - 17.30 WIB	Paparan Kabid APK Puskeu Polri tentang Anev Laporan Keuangan Polri T.A. 2020 dan permasalahannya
17.30 - 19.30 WIB	Ishoma;

- d. Hari/Tanggal : Rabu, 7 April 2021  
Pukul : 06.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Hotel Aston Sentul Lake;  
Jalan Pakuan No. 3 Sentul City Kabupaten Bogor.

**Acara :**

06.00 - 07.00 WIB	Olah raga bersama;
07.00 - 08.00 WIB	Sarapan Pagi;
08.00 - 11.15 WIB	Arahan dan Penyampaian kebijakan dan hasil Rapim Polri tahun 2021 serta Pembulatan/ Penutupan Rakernis fungsi keuangan tahun 2021 oleh Kapuskeu Polri.

**Materi Pelaksanaan**

**a. Arahan Kapolri**

Dalam arahannya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Rakernis sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2020 serta menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempersiapkan tantangan tugas yang akan dihadapi sepanjang Tahun 2021.

- 2) penyelenggaraan Rakernis jajaran Satker sangat penting dilaksanakan pada awal Tahun 2021 untuk menyamakan visi, misi, pola berpikir, dan pola bertindak dalam menyelenggarakan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai dinamika tantangan tugas.
- 3) Pembukaan Rakernis gabungan ini dilaksanakan bersamaan agar lebih efektif dan efisien.
- 4) Terkait dengan fungsi keuangan Kapolri menekankan beberapa hal antara lain :
  - a. Pertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Polri yang sudah di dapat untuk ke-8 kalinya;
  - b. Lakukan kordinasi dengan kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk segera merealisasikan tunjangan jabatan fungsional pada Polri;
  - c. Laksanakan percepatan pelaksanaan anggaran Dipa Polri khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat Kemenkeu nomor: S-1097/MK.05/2020;
  - d. Laksanakan percepatan Refocussing dan realokasi anggaran Dipa T.A. 2021 sesuai surat Kemenkeu nomor: S-30/MK.02/2021;
  - e. Berikan bimbingan teknis tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBPN di lingkungan Polri;
  - f. Manfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) Ucapkan terima kasih dan apresiasi atas terciptanya aplikasi Puskeu Presisi. Saya berharap aplikasi ini benar-benar dapat diwujudkan karena dengan adanya aplikasi ini harapan saya seluruh jajaran bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh anggota Polri. Pertahankan dan tingkatkan apa yang sudah dicapai pada masa selanjutnya.

**b. Arahan Kapuskeu Polri**

Dalam arahannya Kapuskeu Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H. menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penjabaran program Kapolri untuk menjadikan Polri yang Presisi terdiri dari empat bidang, 16 Program Prioritas, dengan rincian sebagai berikut :

**A. Transformasi Organisasi :**

1. Penataan Kelembagaan;
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi;
3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di era *Police 4.0*.

**B. Transformasi Operasional :**

1. Pemantapan Kinerja Harkamtibmas;
2. Peningkatan Kinerja Penegak Hukum;
3. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19 (PC);
4. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
5. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional;
6. Penguatan Penanganan Konflik Sosial.

**C. Transformasi Pelayanan Publik:**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi;
3. Pemantapan Komunikasi Publik.

**D. Transformasi Pengawasan**

1. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan;
2. Penguatan Fungsi Pengawasan;
3. Pengawasan Oleh Masyarakat (*Public Complaint*).

- 2) Sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pada Polri Pengelolaan Keuangan negara telah mencakup keseluruhan kegiatan dimana tahap perencanaan dilakukan oleh Srena Polri, Tahap Penguasaan dilakukan oleh Slog Polri, Tahap Pelaksanaan di kelola oleh masing-masing Satker di lingkungan Polri, untuk tahap pengawasan di lakukan oleh Itwasum Polri sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban di lakukan oleh Puskeu Polri.
- 3) Pada Tahun 2020 Puskeu Polri juga telah melakukan Penataan Kelembagaan dengan melaksanakan :
  - a. Mengusulkan peningkatan eselonisasi Puskeu Polri menjadi Eselon I;
  - b. Mengusulkan nevelering jabatan Kabidkeu Polda wilayah Jawa menjadi II B2;
  - c. Mengusulkan nevelering jabatan Kabid APK menjadi II B1.
- 4) Puskeu Polri pada tahun 2020 juga melakukan perubahan sistem dan metode organisasi dengan melakukan :
  - a. Penyusunan HTCK dan *Standar Operasional Procedure* (SOP);
  - b. Melakukan Revisi beberapa regulasi di bidang keuangan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di era 4.0 dengan membuat telaahan staf tentang program peningkatan SDM fungsi keuangan yang berkompeten dan profesional dalam rangka regenerasi pengemban personel pada fungsi keuangan.
- 5) Pelaksanaan pembangunan aplikasi sistem teknologi pengelolaan penganggaran dan keuangan Polri “Puskeu Presisi”. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Puskeu Polri melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring penyerapan anggaran dan penerimaan, pelaporan kepada Kemenkeu serta melakukan analisa dan eksplorasi data untuk keperluan memperkuat fungsi pengawasan atau audit. Di harapkan dengan aplikasi ini pihak pengambil keputusan bisa memanfaatkan data untuk melakukan monitoring, early warning agar pelaporan yang tepat waktu dan akurat bisa dilakukan. Sedangkan ditingkat operasional Satker diharapkan bisa membantu pekerjaan Satker untuk melakukan monitoring dan kontrol atas input data baik melalui aplikasi SIMAK, SAIBA maupun SAS.
- 6) SOP yang telah dibuat oleh Para Kabidkeu akan dioperasionalkan dan dijadikan pedoman untuk seluruh jajaran keuangan dalam mengelola keuangan negara.

**c. Paparan oleh Sespuskeu Polri**

Dalam pembahasan Sespuskeu Polri Kombes Pol. Ane Kristina, S.A.P menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja Polri T.A. mencapai 94,69%. Dimana jumlah Dipa Polri pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.477.489.060.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 99.880.476.658.280.

- 2) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Reaktivitas Polri T.A. 2020 masuk dalam kategori Baik dengan nilai akhir sebesar 94,86.
- 3) Pada ABPN T.A. 2021 Polri menduduki posisi 3 untuk kementerian/lembaga yang memiliki pagu terbesar dengan jumlah sebesar 112,1 Trilyun untuk urutan pertama dan kedua adalah kementerian PUPR dengan Dipa sebesar 149,8 Trilyun dan Kemenhan dengan Dipa 137,2 Trilyun.
- 4) Sasaran Strategis Puskeu Polri masuk kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polri tahun 2020 yaitu pada sasaran strategis Good Governance dan Good Government dengan indikator utamanya Opini BPK atas Laporan Keuangan dan sasaran strategis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dengan indikator utamanya Nilai Kinerja Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2021 sasaran strategis Puskeu yang masuk kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polri tahun 2021 adalah Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani.
- 5) Alokasi anggaran Polri T.A 2021 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 53,977 T (48,14%), Belanja Barang sebesar Rp. 28,507 T (25,42%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 29,640 T (26,44%).
- 6) Anggaran Polri sebesar Rp. 112.125.151.565 Trilyun telah di *refocussing* sebesar Rp. 5.506,9 Trilyun sehingga anggaran Polri tahun 2021 menjadi Rp. 106.618.215.863,- Trilyun.
- 7) Jumlah Bendahara Pengeluaran Satker di lingkungan Polri T.A. 2021 sebanyak 1.416 orang, yang telah memiliki sertifikat BNT berjumlah 1.322 orang sedangkan sebanyak 94 orang belum memiliki sertifikat BNT.
- 8) Hasil Uji Petik Rekening *Virtual Account* (VA) di Polda NTT terdapat kendala yang di hadapi Bank BRI dalam mengelola rekening diantaranya adalah :
  - a. Kurangnya sosialisasi/pendampingan implementasi VA secara langsung;

- b. Kantor unit Bank BRI belum dapat melayani pencairan dana dalam jumlah besar;
- c. Nomenklatur pada kartu ATM masih menggunakan nama Satker lama;
- d. Dashboard monitoring belum seluruhnya menampilkan transaksi Satker;
- e. Jarak antar Satker dengan Bank cukup jauh.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Satker adalah :

- a. Belum adanya KPPN bayangan untuk melayani Satker yang jarak tempuh ke KPPN memerlukan waktu;
- b. Tidak adanya dukungan kendaraan untuk operasional;
- c. Sistem pembayaran kepada pihak ketiga masih dengan menggunakan sistem “tunai” tidak menggunakan CMS;
- d. Update Rekening pada aplikasi Sprint belum seluruhnya dilaksanakan;
- e. Dashboard sebagai monitoring transaksi belum digunakan secara maksimal.

**d. Paparan Kabidkeu II**

Dalam Paparannya yang membahas tentang Mekanisme pencairan PNBP di lingkungan Polri, Kabidkeu II Kombes Pol Enjih Sanjaya, S.E. menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Tata cara pembayaran PNBP pada Satker Polri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk satker Polri di Kewilayahan/Daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu dipa PNBP;
  - b. Khusus untuk satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan (MP);

- 2) Mekanisme pembayaran, pencairan, penggunaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN berpedoman pada Permenkeu nomor : 190/pmk.5/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, dan Perubahannya nomor. 178/pmk.05/2018;
- 3) Satker Polri selaku pengguna PNBPN yang berasal dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menkeu tentang tata cara pengelolaan PNBPN dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTL) milik pemerintah pusat;
- 4) Dalam rangka pencairan dana PNBPN untuk Satker Polri di Kewilayahan/Daerah dan Satker Mabes Polri, , Kapuskeu Polri mengajukan surat permohonan persetujuan pencairan dana PNBPN kepada Dirjen Perbendaharaan;
- 5) Satker pengguna PNBPN dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBPN yang dapat digunakan sesuai Pagu PNBPN dalam dipa maksimum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hal Satker belum memperoleh PNBPN dapat berikan UP sebesar 1/12 dari pagu dana PNBPN maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**CATATAN :**

- 1) Penarikan dana PNBPN berdasarkan RPD dan pelaksanaan kegiatan Satker sesuai jadwal yang telah ditetapkan (PMK No. 197/pmk.05/ 2017).

**e. Paparan Kelompok I**

Paparan hasil diskusi kelompok I disampaikan oleh Kabidkeu Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Takwil Ichsan, S.E. Ak., M.Si tentang *Standar Operational Prosedure (SOP) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)*.

**f. Paparan Kelompok II**

Paparan hasil diskusi kelompok II disampaikan oleh Kabidkeu Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Bagus Srigustian, S.H., M.H. tentang *Standar Operational Prosedure (SOP) Bendahara Pengeluaran (Bensatker)*.

**g. Paparan Kelompok III**

Paparan hasil diskusi kelompok III disampaikan oleh Kabidkeu Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Djoko Djohartono, S.H., M.H. tentang *Standar Operational Prosedure (SOP) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)*.

**h. Paparan Kelompok IV**

Paparan hasil diskusi kelompok IV disampaikan oleh Kabidkeu Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol. Herujito, S.E., M.Ak, AK tentang *Standar Operational Prosedure (SOP) Bendahara Penerimaan (BENMA)*.

**i. Paparan Kabid Pembiayaan**

Dalam paparannya yang disampaikan oleh Kabid Pembiayaan Puskeu Polri Kombes Pol Ronny Azwawie, S.H., S.I.K. menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Realisasi Tunjangan Kinerja Polri pada T.A. 2020 mencapai 79% dari Dipa. Adapun Jumlah dana Tunjangan Kinerja Polri T.A. 2020 sebesar Rp. 20.781.222.282.000,- realisasinya sebesar Rp. 16.321.456.470.053,-. Sedangkan untuk realisasi tunjangan kinerja T.A. 2021 sampai dengan bulan Februari baru sebesar

Rp. 2.703.285.319.951 atau 13% dari jumlah Dipa sebesar Rp. 21.376.002.239.000,-.

2) Realisasi dana Kontijensi Dukops Kapolri T.A. 2020 mencapai 100%, artinya dana yang terdapat dalam Dipa sebesar Rp. 307.987.024.000,- dapat tertarik semuanya. Dana kontijensi Dukops Kapolri T.A. 2020 digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Kapolri antara lain :

a. Dukops Nemangkawi	Rp. 179.718.088.000,-
b. Dukops Tinombala	Rp. 4.857.340.000,-
c. Satgas Nusantara	Rp. 16.424.572.000,-
d. Insentif WBK, WBBM	<u>Rp. 106.987.024.000,-</u>
JUMLAH -----	<b>Rp. 307.987.024.000,-</b>

3) Dana Kontijensi Polri T.A. 2020 sebesar Rp. 561.270.137.000,-. Realisasinya sebesar Rp. 453.949.357.400,- terdapat sisa sebesar Rp. 107.320.779.600,-. Sisa dana Kontijensi Polri T.A. 2020 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2020.

4) Dana Jaldis Mutasi Polri T.A. 2020 sebesar Rp. 20.673.500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 20.673.500.000,-.(100%).

5) Penerimaan dana Samsat Polri T.A. 2020 sebesar Rp. 138.096.887.324,-.

**Permasalahan :**

- a. Bidkeu Polda menutup/mengganti nomor rekening bank untuk dana kontijensi, jaldis mutase,samsat tanpa pemberitahuan ke Bidang Pembiayaan Puskeu Polri sehingga terjadi retur pada saat penyaluran dana tersebut;
- b. Untuk pengembalian kontijensi dari Bidkeu Mabes/Polda masih adanya pengembalian lewat tahun anggaran (TAYL);
- c. Pada saat penyeteroran dana samsat ke Puskeu tidak mencantumkan nama Polda pengirim dan triwulan penerimaan dari Dispenda/tidak atas nama personil;

- d. Masih terdapat pengembalian sisa tunjangan ke Puskeu Polri bulan Januari 2021.

**Solusi :**

- a. Bidkeu mengirimkan surat pemberitahuan apabila terjadi pergantian nomor rekening bank untuk dana kontijensi, jaldis mutasi, samsat ke Kapuskeu Polri u.p. Kabid bia;
- b. Bidkeu Mabes/Polda agar berkoordinasi dengan Satker pengguna anggaran sehingga tidak terulang kembali banyaknya pengembalian lewat tahun anggaran (TAYL);
- c. Kabidkeu polda berkoordinasi dengan Dirlantas untuk memberikan data Polda saat pengiriman setoran dana samsat ke Puskeu Polri;
- d. Kabidkeu Polda agar melaporkan sisa tunjangan per bulan agar tidak terjadi pengembalian di awal tahun berikutnya, apabila masih terjadi maka akan ditegur.

**j. Paparan Kelompok V**

Paparan hasil diskusi kelompok V disampaikan oleh Kabidkeu Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Rudi Purwiyanto, S.I.K., S.H., M.H. tentang Standar Operational Prosedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Tingkat Satker/Subsatker.

**k. Paparan Kelompok VI**

Paparan hasil diskusi kelompok VI disampaikan oleh Kabidkeu Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Heni Kresnowati S. Putri, S.E., M.Si tentang Standar Operational Prosedure (SOP) Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang dan Barang/Jasa.

**l. Paparan Kelompok VII**

Paparan hasil diskusi kelompok VII disampaikan oleh Kabidkeu Polda Jawa Barat, Kombes Pol Endang Sri Wahyu Utami, S.I.K. tentang

Standar Operational Prosedure (SOP) Penerimaan dan Penggunaan Dana Samsat Polda.

**m. Paparan Sosialisasi Aplikasi Puskeu Presisi**

Dalam paparannya yang disampaikan oleh Pol Eryek Kusmayadi, S.Sos., S.I.K. menyampaikan tentang sosialisasi Aplikasi Puskeu Presisi.

Aplikasi Puskeu Presisi berisikan suatu sistem teknologi pengelolaan penganggaran yang dirancang khusus untuk membantu proses pengelolaan penganggaran Polri secara cepat dan mudah. Tujuan dari Aplikasi Puskeu Presisi adalah untuk mempermudah kerja petugas di jajaran keuangan. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menarik data dari Kemenkeu dan di Bidkeu di satker bisa bekerja di aplikasi ini.

Dari satu kegiatan terkait keuangan, kini petugas bisa langsung melakukan pengawasan kerja pada seluruh satker. Dari sisi penerimaan, aplikasi ini juga bisa memonitor PNBPN yang masuk secara cepat. Pasalnya, semua dana-dana yang masuk bisa langsung diakses dari aplikasi Simponi di Kemenkeu. Oleh karena itu aplikasi ini bekerjasama dengan Kemenkeu, sehingga data yang ada di Kemenkeu sama persis dengan data yang ada aplikasi Puskeu Presisi.

Menu yang dikelola Aplikasi Puskeu Presisi adalah :

- 1.Gaji dan Tunjangan Kinerja Personel Polri
- 2.Laporan Keuangan Polri
- 3.Dipa Polri
- 4.Aset Polri
- 5.PNBP pada Polri
- 6.Hibah
- 7.Anggaran Kontijensi
- 8.Persediaan
- 9.BLU pada Polri
- 10.Dashboard Keuangan Polri

**n. Paparan Kabidkeu II**

Dalam Paparannya yang membahas tentang Anev Atas Pengelolaan PNBPN di lingkungan Polri, Kabidkeu II Kombes Pol Enjih Sanjaya, S.E. menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang dihadapi atas pengelolaan PNBPN di lingkungan Polri yaitu
  - a. Peraturan pelaksanaan PNBPN Polri sebagai tindak lanjut dari PP nomor 76 tahun 2020 masih dalam proses penyusunan Perkap di Divkum Polri;
  - b. Masih adanya perbedaan persepsi dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan PNBPN Polri sehingga pelaksanaan PNBPN Polri terutama fungsi Pam Obvit, diklat dan lain-lain mengalami kendala dalam pelaksanaannya;
  - c. Masih adanya Benma dalam penerimaan, penyetoran, penatabukuan/ pelaporan PNBPN Polri utamanya pada setiap akhir tahun anggaran belum sesuai dengan ketentuan;
  - d. Masih adanya Benma dalam memasukkan kode akun PNBPN belum sesuai (salah memasukan kode akun) dan daalm penyetoran PNBPN ke bank persepsi belum memintakan NTPN dan NTB dari bank yang bersangkutan;
  - e. Biaya transportasi terkait PNBPN yang disetor dan kendala jaringan internet (kondisi geografis indonesia dari sabang s.d merauke);
  - f. Benma harus memiliki sertifikasi bendahara yang dikeluarkan oleh Menkeu (Perpres No. 7 tahun 2016 dan PMK Noo. 230/pmk.05/2016) dan Benma yang tidak masuk dalam SOTK Satker sehingga tidak mendapatkan tunjab tetapi diberikan honor setiap bulan;
  - g. adanya keterbatasan SDM Polri dan kedudukan Benma berada pada Satker penerima PNBPN sehingga Benma masih melaksanakan tugas opsnal lainnya, serta sarana prasarana

kerja benma yang masih belum terdukong (ruangan kantor, komputer/laptop, ranmor, dan lain-lain).

- 2) Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait pengelolaan PNBPN ditemukan adanya:
  - a. PNBPN tidak disetor tepat waktu atau terlambat setor;
  - b. PNBPN digunakan langsung di luar mekanisme APBN;
  - c. PNBPN kurang/belum dipungut;
  - d. PNBPN belum didukung dengan dasar hukum yang memadai.
- 3) Langkah Perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam melakukan Pengelolaan PNBPN K/L adalah :
  - a. Bidang Administrasi
    - Meminta K/L untuk mengoptimalkan fungsi Itjen dalam pengawasan pengelolaan keuangan;
    - Meminta BPKP untuk memeriksa pengelolaan PNBPN pada beberapa K/L.
  - b. Bidang Regulasi
    - Revisi UU PNBPN dan Revisi PP Tarif PNBPN;
    - Perumusan mekanisme penyetoran PNBPN secara berkala;
    - Penerbitan PMK No. 192 tahun 2012 tentang peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan PNBPN pada K/L.

**o. Paparan Kabid Akuntansi Pelaporan Keuangan (APK)**

Dalam paparannya yang disampaikan oleh Kabid APK Puskeu Polri Kombes Pol Zulfikar Asmiragani, S.E., S.Ked., M.Si. terkait Evaluasi Laporan Keuangan Polri T.A. 2020 *Unaudited* disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi anantara lain sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat pagu minus (6 digit) di 199 Satker yang terdiri dari :
  - a. Belanja 51 terdapat 186 Satker dengan jumlah pagu minus sebesar Rp. 18.077.854.401,-
  - b. Belanja 52 terdapat 13 Satker dengan jumlah pagu minus sebesar Rp. 763.477.510,-.

- 2) Masih terdapat Hibah yang belum disahkan sebesar Rp. 4.291.287.081 yang terdiri dari hibah barang sebesar Rp. 240.632.081 terdapat pada Polres Mimika. Hibah uang sebesar Rp. 500.000.000,- terdapat pada Polres Pelalawan, hibah uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- terdapat pada Polres Boven Digoel dan hibah uang sebesar Rp. 50.655.000 terdapat pada Polres Pegunungan Bintang.
- 3) Terdapat kesalahan penggunaan akun pada 2 Satker, terdiri dari :
  - a. Satker Bid Humas Polda Kepulauan Riau pada jenis belanja 51 dimana satker Bid Humas Polda Riau menggunakan akun umum dimana seharusnya menggunakan Akun 511161 Belanja.... PNS TNI/Polri;
  - b. Satker Polres Tulang Bawang pada jenis belanja 52 dimana Polres Tulang Bawang menggunakan akun 52632X untuk kegiatan menunjang tusi Polri setelah di teliti akun tersebut merupakan akun milik Kemensos. Seharusnya akun yang digunakan adalah 521131 untuk Tusi Polri atau 521241 untuk menunjang Tusi Polri.
- 4) Pada Aset terdapat permasalahan dua permasalahan yaitu :
  - a. Nilai Perolehan Minus. Pada Aset Intrakomtabel terdapat 10 Satker dengan jumlah barang 253 senilai Rp. 18.793.822.704,-. Sedangkan pada Aset Ekstrakomtabel terdapat 3 Satker dengan jumlah barang 67 senilai Rp. 190.942.695,-. Hal ini disebabkan adanya nilai penyusutan lebih besar dari nilai perolehan.
  - b. Nilai Buku Minus. Untuk Aset Intrakomtabel terdapat 27 Satker di 11 Polda dengan jumlah barang 9.522 senilai Rp. 41.495.400.482,-. Sedangkan untuk Aset Ekstrakomtabel terdapat 8 Satker dengan jumlah barang 3.382 senilai Rp. 499.636.693,-.
- 5) Pada Neraca Percobaan Akrual masih terdapat nilai selisih antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk senilai Rp. 59.259.412.518,-.



**BAB III**  
**HASIL YANG DICAPAI**

Dengan dilaksanakan Rakernis Keuangan Polri T.A. 2021 ini telah disampaikan dari berbagai pemikiran untuk mendapatkan pemahaman dan solusi serta meningkatkan kinerja fungsi keuangan Polri pada T.A. 2021, yang terdiri dari pengarahan Kapolri, Kapuskeu Polri, Sespuskeu Polri dan pejabat utama Puskeu Polri yang terkait tugas dan fungsi keuangan Polri serta permasalahan yang dihadapi. sehingga dengan telah dilaksanakannya Rakernis Keuangan Polri Tahun 2021 ini maka disampaikan beberapa penekanan dan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penekanan Kapolri kepada jajaran fungsi keuangan Polri :
  - 1) Pertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Polri yang sudah di dapat untuk ke-8 kalinya;
  - 2) Lakukan kordinasi dengan kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk segera merealisasikan tunjangan jabatan fungsional pada Polri;
  - 3) Laksanakan percepatan pelaksanaan anggaran Dipa Polri khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat Kemenkeu nomor : S-1097/MK.05/2020;
  - 4) Laksanakan percepatan Refocussing dan realokasi anggaran Dipa T.A. 2021 sesuai surat Kemenkeu nomor: S-30/MK.02/2021;
  - 5) Berikan bimbingan teknis tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBPN di lingkungan Polri;
  - 6) Manfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang efektif dan efisien, transparan dan akun tabel.
- b. Aplikasi Puskeu Presisi harus benar-benar dapat diwujudkan karena dengan adanya aplikasi ini diharapkan seluruh jajaran bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh anggota Polri. Selain itu di harapkan dengan aplikasi ini pihak pengambil keputusan bisa memanfaatkan data untuk melakukan monitoring, early warning agar pelaporan yang tepat waktu dan akurat bisa dilakukan. Sedangkan ditingkat operasional Satker diharapkan bisa membantu pekerjaan Satker untuk melakukan monitoring dan kontrol atas input data baik melalui aplikasi SIMAK, SAIBA maupun SAS.
- c. Laporan Keuangan Polri T.A. 2020 harus dapat meraih predikat WTP kembali, karena selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut kita telah mendapatkan opini WTP.

Selanjutnya kita persiapkan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan yang akan menuju Standar Internasional;

- d. Penyelesaian Pagu Minus;
- e. Kesalahan Penggunaan akun belanja dampak perubahan dari minimum Kapitalisasi Aset tetap;
- f. Penyelesaian permasalahan aset terkait nilai perolehan minus dan nilai buku minus;
- g. Penyelesaian selisih transfer keluar-transfer masuk (TK-TM) asset;
- h. Puskeu Polri mendukung program Kapolri melalui peningkatan profesionalisme dengan melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas Pusat Keuangan Polri pembangunan aplikasi sistem teknologi pengelolaan penganggaran dan keuangan Polri;
- i. *Standar Operational Procedure (SOP)* yang telah disusun oleh para Kabidkeu Mabes/Polda pada acara Rakernis Fungsi Keuangan Polri T.A. 2021 akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Puskeu Polri yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara di lingkungan jajaran keuangan Polri;
- j. Mengimplementasikan secara konkret hasil Rakernis ini guna mewujudkan Laporan Keuangan Polri T.A. 2021 yang transparan dan akuntabel dalam rangka upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Polri dan mengantisipasi temuan dari BPK RI.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Rakernis Fungsi Keuangan Polri T.A. 2021 ini dibuat dan dilaporkan kepada Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan masukan serta pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, April 2021

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

